

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, Zainal, 2005, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3: Pidana, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005*, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alifia, Ummu, 2019, *Apa itu Narkotika dan NAPZA*, ALPRIN, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- , 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 2008, *Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edyyono, Supriyadi Widodo, *et al.*, 2017, *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta.

- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Depok.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Efritadewi, Ayu, 2020, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjung Pinang.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunawan, Ricky, *et al.*, 2021, *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hutapea, Tumbur Palti D., “Implementasi Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika: Catatan Pendahuluan” dalam Tumbur Palti D. Hutapea, *et al.*, 2020, *Rekonstruksi Ideal Implementasi Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Prenadamedia Group
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

- Ikhtiar, Hisyam, 2019, *Pasar Gelap Narkotika di Penjara: Imbas Kebijakan Punitif*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta.
- Imron, Ali dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Pamulang Press, Tangerang Selatan.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 2011, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kartanegara, Satochid, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Kerlinger, Fred, 1996 *Asas-asas Penelitian Behavioral*, diterjemahkan Landung R. Simatupang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Krisnawati, Dani, *et al.*, 2006, *Bunga rampai pidana khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Makarao, Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2012 *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mudzakir, *et al.*, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 1997, *Pengadilan, Peradilan, dan Putusan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Nazir, Mohammad, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1989, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Gramedia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rapar, Jan Hendrik, 1996, *Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Remmelink, J., 2017, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, Maharsa, Yogyakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, 2003, Mandar Maju, Bandung.

- Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1981 *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab)*, Politea, Bogor.
- Sriwidodo, Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugiharto, R, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tresna, R., 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Pebuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta.
- Utrecht, 1986, *Rangkaian Sari Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- , 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang, Setara Press.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Bersama 7 Lembaga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

### **C. JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DAN MAKALAH**

Adianingsih, Dayu Purnama, 2019, *Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalah Guna Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik RUU KUHP*.

Biro Humas dan Protokol BNN RI, “Press Release Akhir Tahun 2020”, *Badan Narkotika Nasional*, 2020.

Deniasari, Emma, 2018, *Penjatuhan Pidana Penjara dan Tindakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Gunawan, Ricky, Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 1, 2012.

Ikharr, Alkhaisar Jainar, 2013, *Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Putusan Nomor 182/ Pid.B/2012/PN.Blk.*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Irmawati, Noveria Devy dan Arief, Barda Nawawi, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No. 2, 2011.

Kansil, Fernando I., “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, 2014.

Krisnawati, Dani dan Utami, Niken Subekti Budi, “Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2, 2015.

Leasa, E.Z., Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track System*) Dalam Kebijakan Legislasi, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, 2010

Pitaloka, Erisa, 2020, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang.

Ramadhani, Gita Santika, “Sistem Pidana dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, 2012.

Sadikin, Sir, 2019, *Tujuan Pemidanaan Delik Pencurian (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Adat di Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Satriadi, 2018, *Problematika Kebijakan Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutrisno, *et al.*, Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Tobing, Fredy B.L., “Aktifitas *Drug Trafficking* Sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara”, *Global*, Vol. 5, No. 1, 2002.

Utiahman, Andre Putra, “Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 10, 2019.

Wantu, Fence M., Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012

Wiharyangti, Dwi, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Pandecta*, Vol. 6, No. 1, 2011.

#### **D. INTERNET**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Data Narapidana dan Tahanan per 13 September 2021”, <http://202.62.9.35/>, diakses 13 September 2021.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil, <http://202.62.9.35/public/grl/current/daily/date/2021-10-13>, diakses 13 Oktober 2021.

Humas BNN, Angka Prevalensi Penyalahguna Narkoba Nasional Tahun 2020, <https://yogyakartakota.bnn.go.id/angka-prevalensi-penyalahguna-narkoba-nasional-tahun-2020/> , diakses 2 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkotika, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/NARKOTIKA>, diakses 16 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sanksi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>, Diakses 13 Oktober 2021.

Kedaulatan Raktat Jogja, “Penyalahgunaan Narkoba di DIY Terus Meningkat”, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/penyalahgunaan-narkoba-di-diy-terus-meningkat/> , diakses 22 November 2021.

Putu Indah Savitri, “BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa”, <https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa> , diakses 2 April 2022.

Tribun Jogja, “BNN Kota Yogyakarta Diskusi dengan Wartawan Bahas Soal Bahaya Penyalahgunaan Narkoba”, <https://jogja.tribunnews.com/2021/08/18/bnn-kota-yogyakarta-diskusi-dengan-wartawan-bahas-soal-bahaya-penyalahgunaan-narkoba>, diakses 22 November 2021.

## E. Lain-Lain

Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato, Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993.

Shinta Agustina, “Menuju Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Kajian Terhadap RUU-KUHAP dari Berperspektif HAM)”, *Diskusi Publik*, Membangun Dukungan dari Masyarakat dalam Proses Advokasi RUU KUHAP, Padang, 26 Januari 2010.